

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
JALAN HANG JEBAT 81 BATU BESAR NONGSA 29466



**LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI
DATA KRIMINALITAS TINDAK PIDANA UMUM
PADA DITRESKRIMUM DAN SATRESKRIM
JAJARAN POLDA KEPRI
BULAN DESEMBER TH. 2019**



Batam, Desember 2019

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

**LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI
DATA KRIMINALITAS TINDAK PIDANA UMUM
PADA DITRESKRIMUM DAN SATRESKRIMUM
JAJARAN POLDA KEPRI BULAN DESEMBER 2019**

PENDAHULUAN

1. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- b. Perundang-undangan lain yang terkait dengan kewenangan pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- e. Surat Edaran Kabareskrim Nomor : B/1574/Ops/IV/2012/Bareskrim tanggal 23 April 2012 tentang pengiriman Laporan Bulanan;
- f. Renja Ditreskrimum Polda Kepri TA. 2019.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Bulanan ini dibuat dengan maksud sebagai laporan kepada Kabareskrim Polri tentang pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri

b. Tujuan

Laporan bulanan ini ditujukan kepada Kabareskrim Polri, Karo, Kapus dan Direktur yang berkepentingan guna memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri dan jajaran.

3. Ruang Lingkup

Laporan Bulanan ini dibuat meliputi perkembangan kriminalitas selama bulan Desember Tahun 2019, pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai, analisa dan evaluasi serta hambatan yang ditemui.

4. Tata Urut

- a. PENDAHULUAN
- b. TUGAS YANG DILAKSANAKAN
- c. SITUASI
- d. HASIL YANG DICAPAI
- e. ANALISA DAN EVALUASI
- f. PENUTUP

TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Tugas

- a. Ditreskrim bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Reskrim yang meliputi kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum;
- b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Ditreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - 1) pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Ditreskrim, dalam lingkungan Polda Kepri;
 - 2) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak-anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - 3) penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.;
 - 4) pelaksanaan analisa setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas dan pelaksanaan tugas subdit – subdit fungsi Reskrim;
 - 5) memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal Umum oleh subdit – subdit kewilayahan di wilayah Hukum Polda Kepri;
 - 6) membantu menyelenggarakan latihan berkaitan dengan fungsi Reserse Kriminal Umum dalam lingkungan Polda Kepri;

- 7) pembinaan fungsi melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penataran, pengarahan lisan/ tertulis serta melaksanakan semua arahan atau piranti lunak yang diterima oleh Mabes Polri;
- 8) melaksanakan fungsi Reserse Kriminal Umum, baik berupa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta back-up kepada subdit bawahan sesuai bidang - bidang sebagai berikut :
 - a) Bidang Keamanan Negara
 - (1) mengadakan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang tujukan terhadap jiwa, badan, kemerdekaan, kehormatan orang dan benda serta kejahatan lainnya;
 - (2) mengamati gangguan kamtibmas dan melaksanakan deteksi dini mungkin terhadap gerak para bekas napi terutama residivis (pelaku peledakan bom);
 - (3) melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Unjuk rasa, Kejahatan Politik, Kebakaran, yang terjadi sampai tuntas;
 - (4) meningkatkan kegiatan kring Reskrimum secara selektif pada daerah-daerah rawan;
 - (5) melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan;
 - b) Bidang Harda – Bangtah
 - (1) menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan obyek harta benda dan bangunan tanah yang berdampak kerugian secara materiil kepada individu maupun negara;
 - (2) ruang lingkup kegiatan bidang Harda Bangtah meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana :
 - (a) kejahatan dengan sarana dokumen palsu dan atau keterangan palsu yang dituangkan dalam akta autentik sehingga menimbulkan kepemilikan fiktif;
 - (b) penggelapan barang bergerak atau tidak bergerak (harta benda);
 - (c) penipuan atau dengan menggunakan upaya licik, nama palsu, kebohongan, untuk mendapatkan barang dari orang lain secara melawan hak;
 - (d) menguasai bidang tanah tanpa hak;
 - (3) memberikan bimbingan teknis penyelidikan dan penyidikan penanganan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada point 2 kepada satuan wilayah (Polres, Polsek);

- (4) melaksanakan koordinasi dengan instansi lain (Pengadilan, Kejaksaan, BPN, Pemda, Notaris, FH-UI) untuk menuntaskan penyidikan tindak pidana Harda Bangtah;
 - (5) melakukan pengawasan terhadap pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah atau proyek vital untuk menghindari penyelewengan;
 - (6) melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah pimpinan.
- c) Subdit Jatanras
- (1) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan : kesopanan, penghinaan atau penistaan, membuka rahasia kemerdekaan seseorang, jiwa, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemerasan dan ancaman serta penghancuran/ pengrusakan barang;
 - (3) pembinaan fungsi penyelidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagai dimaksud huruf (a) serta kesatuan - kesatuan lain yang menjadi tugas Subdit Serse Um dalam lingkungan Ditreskrimum;
 - (4) melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya;
 - (5) memberikan bantuan operasi atas pelaksanaan fungsi teknis ke Reserse Umum dilingkungan Polda Kepri;
 - (6) melaksanakan kegiatan administrasi operasi Penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, Informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis;
 - (7) urusan administrasi, penyidik yang disingkat paur mindik dan unit-unit opsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban kepada Kasubdit Reserse Umum.
- d) Subdit Renakta
- (1) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang secara spesifik pelaku atau korbannya adalah anak-anak, remaja dan wanita dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus;
 - (2) pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud huruf (a) serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Subdit Serse Renakta dalam lingkungan Dit Reskrimum;
 - (3) melaksanakan operasi-operasi khusus yang diperintahkan kepadanya;
 - (4) memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis keresersean umum dilingkungan Polda Kepri;

- (5) melaksanakan kegiatan administrasi operasional penyidikan termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknis keresersean yang masuk dalam lingkup tugasnya;

6. Situasi

a. Eksternal

1) I POLEKSOSHANKAM

a) Ideologi

- Penurunan kesadaran masyarakat tentang Idiologi Pancasila dan bahaya laten komunisme tampaknya telah dimanfaatkan oleh kelompok kiri, seperti dengan memutar balikkan fakta-fakta peristiwa S/PKI, membentuk partai politik, ataupun menyusup menjadi anggota Parpol lain untuk menjadi anggota DPR dan DPRD. Hal ini dimungkinkan setelah MK mencabut pasal 60 huruf g UU Pemilu no. 12 tentang eks Tapol/Napol PKI dapat menjadi calon legislatif dalam pemilu. Hal ini tentunya akan memberikan keleluasaan lebih luas untuk mempengaruhi sikap politik parlemen dalam upayanya merealisasikan tujuan politiknya.
- Masih didapati berkembangnya berbagai wacana lain dengan bentuk faham / aliran di luar idiologi Pancasila, terutama menyangkut masalah keagamaan, dimana diketahui bahwa di wilayah Provinsi Kepri terdapat aliran kepercayaan yang cenderung menyimpang dan menuai reaksi negatif masyarakat seperti Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah dan Ahmadiyah di Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
- Menurunnya norma dan etika yang termaktub nilai-nilai ajaran dan falsafah Pancasila cenderung menimbulkan perpecahan di berbagai elemen masyarakat Indonesia baik yang muda atau yang tua. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai kelompok – kelompok pemuda, kesukuan, geng-geng dsb. Dimana kegiatannya kontra produktif dan mudah diprovokasi kearah yang negatif, oleh karenanya banyak

terjadi kasus tawuran antar pelajar, mahasiswa, antar kelompok suku dsb

b) Politik

- Secara umum situasi politik di Kepri cukup kondusif. Hal ini terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar. Meskipun terdapat beberapa kebijakan pemerintah setempat yang bertentangan dengan legislatif namun masih dapat diatasi dengan pendekatan / cara-cara yang baik dan produktif.
- Dalam hal pemberdayaan pulau-pulau terluar juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi Kepri. Hal ini perlu diperhatikan serius mengingat beberapa pulau di wilayah Provinsi Kepri diketahui telah dikelola oleh investor asing seperti Pulau Bawah di Natuna, Pulau Penggalap dan Pulau Segayang di Kecamatan Galang Kota Batam. Kurangnya pengawasan terhadap beberapa pulau tersebut akan berdampak terjadinya penjarahan oleh pihak asing.
- Banyaknya kelompok-kelompok gerakan mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Masyarakat (Ormas) yang belum terdaftar secara resmi di instansi terkait, baik secara taktis maupun strategis bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan. Selain itu tidak sedikit yang menjadikan organisasi/ kelompok tersebut sebagai peluang untuk mata pencaharian, tentunya melalui praktek pungli bahkan ancaman/ pemerasan terhadap oknum pejabat pemerintah/ swasta.
- Adanya beberapa penanganan proyek pembangunan di Kepri yang terbengkalai dan diduga adanya praktek korupsi sehingga tidak pernah terselesaikan hingga saat ini.

c) Ekonomi

- Krisis ekonomi dunia yang mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional tentunya juga berpengaruh terhadap situasi ekonomi di Provinsi Kepri. Banyaknya penurunan produksi di berbagai sektor industri karena naiknya nilai bahan-bahan yang relatif masih impor membuat beberapa perusahaan di Kepri terancam bangkrut. Hal ini akan berpotensi timbulnya permasalahan sosial dengan banyaknya karyawan yang akan di-PHK sehingga berdampak terjadinya unjuk rasa, depresi, bunuh diri dan meningkatnya kriminalitas.
- Pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara laju peningkatan tertinggi terjadi pada sektor bangunan, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memiliki pertumbuhan diatas 10%. Pada sisi permintaan, akselerasi yang cukup tinggi pada investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau. Peningkatan kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi di Kepulauan Riau menjadikan pendorong peningkatan perekonomian, hal ini didukung oleh peringkat Indonesia yang masuk Investment Grade (layak investasi) oleh Fitch dan Moody's. Namun demikian kondisi perekonomian global yang belum membaik menjadi faktor penghambat percepatan pertumbuhan perekonomian. Hal ini disebabkan masih belum pulihnya perekonomian Uni Eropa yang hingga kini masih belum menunjukkan arah perbaikan. Sementara kondisi perekonomian Amerika berada pada kondisi yang menurun dan belum menunjukkan kondisi yang membaik. Di lain pihak, kondisi perekonomian Cina dan India juga menunjukkan perekonomian yang menurun.
- Letak Kepri yang strategis yaitu berdekatan dengan Singapura dan Malaysia berdampak pada perkembangan perekonomian setempat, banyaknya pasokan barang dari kedua negara tetangga tersebut cukup membantu kebutuhan masyarakat Kepri terutama bahan pokok, harganya pun lebih rendah bila dibandingkan dengan mendatangkan dari Pulau Jawa. Namun dampak negatifnya adalah banyaknya praktek penyelundupan yang masih marak terjadi di Kepri mengingat banyaknya

- pelabuhan tikus dan kurangnya sarana dan prasarana untuk pengawasannya.
- Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Wilayah Kepri Khususnya Batam, Bintan dan Karimun dengan segala kemudahan/ fasilitas-fasilitas khusus tidak berjalan dengan baik karena para pengusaha di wilayah Kepri dibingungkan oleh landasan hukum FTZ yang masih tumpang tindih dengan sejumlah aturan lain, terutama kendala yang dihadapi adalah peran institusi Bea Cukai masih dominan dalam wilayah FTZ sehingga mengaburkan fungsi dan keutamaan kawasan FTZ. Hal tersebut dapat mengakibatkan penanam usaha terutama PMA akan menutup usahanya karena menganggap wilayah Kepri tidak kondusif.
- Banyaknya komoditi impor dari Singapura dan Malaysia yang diperjualbelikan di Batam khususnya bidang retail baik itu tas, dompet, sepatu dan sandal berdampak pada diberlakukannya standarisasi dollar Singapura dalam setiap jual beli. Hal ini cukup berpengaruh dalam kondisi melemahnya kurs rupiah saat ini karena krisis ekonomi dunia. Praktek standarisasi dollar juga terjadi pada sebagian besar hotel berbintang baik di Batam atau di Lagoi Bintan yang tentunya menyalahi prosedur BI dan melemahkan daya beli masyarakat setempat.
- Dampak adanya kenaikan harga barang impor dan krisis energi listrik di wilayah Kepri (Tanjungpinang, Bintan, Karimun dan Lingga) juga sangat mempengaruhi perkembangan investasi dan dunia usaha di daerah karena akan meningkatkan biaya operasional termasuk upah buruh, hal ini berpengaruh terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- Permasalahan tambang di wilayah Kepri yang disebabkan karena pemberlakuan permen ESDM no. 7 tahun 2012 berdampak pada terjadinya penutupan usaha/ operasional beberapa lokasi tambang terutama di Bintan, Tanjungpinang dan Karimun. Kondisi tersebut mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran, berkurangnya

daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kriminalitas. Namun sisi positifnya keutuhan lingkungan hidup lebih terjaga karena pemerintah akan lebih selektif dalam memberikan izin usaha pendirian tambang.

- Menjelang hari raya Idul Fitri 1436 H mengakibatkan seluruh bahan pokok mengalami kenaikan harga, ini semakin membuat masyarakat menengah kebawah semakin susah sehingga tidak menutup kemungkinan angka kriminalitas angka naik sebelum, saat dan sesudah hari raya Idul Fitri 1436 H.

d) Sosial dan Kebudayaan

- Masih didapatinya sebagian kelompok Muslim tertentu yang mempunyai pemahaman berbeda terhadap berbagai keyakinan keagamaan menimbulkan disharmonisasi, sehingga memicu kerawanan munculnya konflik internal. Selain itu sengketa rumah ibadah baik itu dalam pembangunannya maupun yang tidak sesuai penggunaannya (bukan peruntukan) juga dapat menimbulkan konflik antar umat beragama yang berujung pada konflik SARA
- Masih didapatinya beberapa aliran sesat yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Hukum Polda Kepri. Menurut data Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat sembilan aliran yang dianggap sesat yaitu : Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah, Qur'an Suci, Sholat Dua Bahasa dan Al-Qiyadah Al-Imamiah. Dari kesembilan aliran tersebut yang sudah terdeteksi di Kepri adalah Ahmadiyah dan Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah di Batam, Bintan dan Tanjungpinang. Namun demikian jika tidak ada langkah konkrit oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi hal tersebut maka dimungkinkan keberadaan aliran tersebut akan semakin meluas dan dampak kerawanan yang ditimbulkan juga semakin besar.
- Masalah perselisihan antara Buruh dengan Perusahaan di Kota Batam, Bintan dan Karimun sering terjadi antara lain masalah PHK, outsourcing, masalah UMK/UMP yang dianggap rendah dan hak-hak karyawan yang belum dipenuhi oleh pihak Management

Perusahaan sehingga sering terjadi aksi mogok kerja Karyawan dan aksi Unjuk Rasa ke Instansi pemerintah (Pemprov, DPRD Provinsi/Kota, Pemkab/Pemko Batam, Disnaker untuk menyampaikan tuntutan mereka yang belum terpenuhi.

- Masalah sengketa tanah dan pengusuran masih terjadi di beberapa daerah yang ada di wilayah Provinsi Kepri, diwarnai dengan aksi protes dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat yang didukung oleh berbagai pihak seperti mahasiswa dan LSM serta Ormas. Tidak sedikit masalah sengketa tanah/ lahan ini berujung pada konflik sosial yang melibatkan kelompok preman yang berlatar belakang kesukuan. Ada beberapa faktor penyebabnya baik itu sebagian masyarakat masih berpegang pada hukum adat / tanah ulayat yang berbenturan dengan hukum nasional, serta adanya keberpihakan dari oknum pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah daerah. Penyebab lainnya adalah adanya tumpang tindih perijinan lahan yang diduga karena unsur kurangnya pengawasan instansi terkait.
- Banyaknya pendatang yang tiap tahun terus meningkat di Kepri khususnya saat pasca lebaran / Idul Fitri menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan sosial diantaranya maraknya gepeng, pengamen, rumah liar dan meningkatnya aksi kriminalitas. Rumah liar yang jumlahnya terus meningkat membuat kompleksitas permasalahan khususnya di Batam, karena berpotensi bahaya kebakaran, sarang teroris dan tindak pidana lainnya. Pola penanganannya pun sudah semakin sulit mengingat bersikerasnya pemilik rumah liar untuk mempertahankan bangunannya tersebut bila akan ditertibkan oleh pemerintah.

e) Pertahanan dan keamanan

- Secara umum situasi keamanan di wilayah hukum Polda Kepri masih kondusif, meskipun masih ada beberapa kasus kriminalitas yang terjadi khususnya di Kota Batam sebagai wilayah yang

terpadat penduduknya dan memiliki permasalahan paling kompleks diantara wilayah lainnya di Kepri. Permasalahan kriminalitas di Batam umumnya adalah curanmor, curas dan curat.

Perdagangan narkoba; masuknya narkoba ke Kepri sebagian besar dari luar negeri yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand kemudian diselundupkan melalui beberapa alternatif diantaranya jalur laut melalui pelabuhan tikus yang masih kurang pengamanannya, jalur udara melalui bandara yang belum dilengkapi dengan alat pendeteksi khusus narkoba, jalur ekspedisi yang sedang marak digunakan dengan menggunakan pengalihan/ penyesatan tanpa alamat pengirim kemudian ditransfer dari satu ekspedisi ke ekspedisi lainnya hingga ke tempat tujuan akhir untuk mempersulit pengungkapannya, ditambah lagi adanya oknum Polri yang menjadi bandar atau terlibat dengan pergaulan Narkoba

- Masih ditemukannya kasus trafficking di wilayah Hukum Polda Kepri yang disebabkan faktor ekonomi para korban dan lemahnya pengawasan dokumen serta upaya penegakan hukum untuk menjaring pelaku utamanya sejak melalui proses perekrutan dari daerah asal, transportasi baik secara legal maupun ilegal serta eksploitasi yang mengarah kepada adopsi ilegal, penjualan organ tubuh, perkawinan dan lain-lain.
- Aksi teroris yang saat ini sedang mengincar personil Polri karena alasan balas dendam mengingat banyaknya kelompok mereka yang telah tertangkap oleh Polri, kelompok yang saat ini sedang gencar diburu oleh tim densus 88 sebagian besar merekrut kelompok pemuda yang masih belum mempunyai pekerjaan tetap dan jauh dari perhatian orang tuanya terutama mempelajari pendidikan agama yang setengah-setengah. **Sasaran yang rawan dijadikan aksi teroris** baik itu penembakan, pelemparan bom/ granat, aksi bom bunuh diri dsb adalah Markas Polisi yang terkesan sepi personil pengamanannya, pos polisi lalu lintas, personil Polri yang berjaga sendiri / berkelompok dilapangan dsb.

NO	KASUS	NOVEMBER 2019			DESEMBER 2019		
		CT	CC	%	CT	CC	%
1.	Sengaja menimbulkan kebakaran	2	2	100	0	1	0
2.	Karena alpa menimbulkan kebakaran/meletus	0	0	0	0	1	0
3.	Pencemaran nama baik	0	0	0			
4.	Perkosaan	0	0	0	1	0	0
5.	Perzinahan	1	0	0			
6.	Pengeroyokan	12	9	75	5	7	140
7.	Palsu Surat/penggelapan surat /ttd/ket.palsu	2	1	50	1	2	0
8.	Perjudian	4	5	125	3	2	67
9.	PTM	1	2	200			
10	Kejahatan Terhadap Jiwa Orang / Pembunuhan	0	0	0			
11	Tki illegal	1	0	0	0	1	0
12	Penganiayaan Ringan	25	14	56	13	27	208
13	Penganiayaan Berat	14	3	21	2	4	200
14	Pencurian Biasa	35	27	77	27	28	104
15	Pencurian Berat	25	8	32	12	20	167
16	Curanmor	29	16	55	17	18	106
17	Pencurian Ringan	2	5	250			
18	Pencurian dengan kekerasan	6	12	200	1	3	300
19	Peras dan Ancam	1	2	200	1	0	0
20	Penggelapan	17	19	112	10	12	120

21	Penipuan	20	18	90	11	26	236
22	Tipu gelap	5	7	140	6	12	217
23	Rusak Barang	2	3	150	2	0	0
24	Jambret	2	4	200	2	0	0
25	Orang hilang/meninggalkan rmh	5	5	100	5	8	160
26	KDRT	15	13	87	3	3	100
27	Temu mayat	3	1	33	7	4	57
28	Perb. Cabul	6	10	167	3	7	233
29	Perlindungan Anak	11	8	73	8	9	113
30	Ttg Tanah/HLM/Perkrng	2	1	50	5	4	67
31	Pengrusakan dan pencurian	1	2	200			
32	Perdagangan Orang	1	0	0	0	1	0
33	Bunuh diri/meninggal dunia	5	5	100	1	3	300
34	Laka kerja	2	0	0	3	5	167
35	Penadahan	1	1	100	1	5	500
36	UU Pernikahan	1	1	100	2	8	400
37	Pornografi	0	0	0	0	1	0
38	Penyalahgunaan senpi/sajam	0	0	0	0	1	0
39	Lain-lain	3	5	167	0	1	0
Jumlah		262	208	79	152	225	148

- 2) Data Laporan Polisi bulan Desember 2019 yang masuk dan ditangani oleh Ditreskrim Polda Kepri

NO	SUBDIT	NOVEMBER 2019			KET
		CT	CC	%	
1	I / KAMNEG	0	0	0	
2	II / HARBANG	1	0	0	
3	III / JATANRAS	3	1	33	P21=1
4	IV / RENAKTA	2	2	100	P21=2
	JUMLAH	6	3	50	
5	BAGBINOPSNAL	0	0	0	
	TOTAL JUMLAH	6	3	50	P21=3

- 3) Dari jumlah kasus sebanyak 152 Kasus dengan jumlah Pelaku sebanyak 83 orang dengan perincian sebagai berikut :
- a) Pelajar / Mahasiswa : 6 Orang
 - b) Swasta / Wiraswasta : 29 Orang
 - c) Buruh / Pedagang : 4 Orang
 - d) Tani / Nelayan : 3 Orang
 - e) TNI/POLRI : 3 Orang
 - f) Karyawan / Peg. Negeri : 5 Orang
 - g) Pengangguran : 14 Orang
 - h) Pengemudi / Tk. Ojek : 1 Orang
 - i) Ibu rumah tangga : 1 Orang
 - j) Lain-lain : 17 Orang
- 4) Modus Operandi dari kasus tersebut meliputi: (diisi sesuai kumpulan modus operandi yang terjadi)
- a) Mencongkel / bongkar jendela/ pintu : 2
 - b) Mengambil barang milik orang lain : 4
 - c) Merusak kunci Stang : 2
 - d) Bujuk rayu dengan tipu daya : 8
 - e) Pinjam uang / barang tidak kembali : 0
 - f) Perkataan bohong pada keadaan palsu : 0
 - g) Berbicara dengan nada kasar : 0

- h) Menggali / memperlebar tanah tanpa ijin : 1
- i) Menampar / memukul : 1
- j) Tidak memberi nafkah lahir dan bathin : 0
- k) Lain-lain : 22
- 5) Alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana sebagai berikut (diisi berdasarkan kumpulan dan fakta yang terjadi)
- a) Obeng / linggis : 3
- b) Kunci Palsu : 2
- c) Parang / golok : 0
- d) Pisau : 0
- e) Tangan kosong : 11
- f) Ranmor : 1
- g) Tali : 0
- h) Lain-lain : 15
- 6) Lokasi yang dipergunakan melakukan tindak pidana :
- a) Dalam Kendaraan : 0
- b) Pemukiman : 59
- c) Terminal Stasion : 4
- d) Jalan Umum : 4
- e) Toko / Pasar : 7
- f) Tempat hiburan : 2
- g) Pabrik : 0
- h) Kampus / Sekolah : 0
- i) Hotel : 0
- j) Tempat Parkir : 7
- k) Rumah Sakit : 0
- l) Kantor : 4
- m) Pesantren : 1
- n) Mesjid / gereja : 0
- o) Kandang : 0
- p) Gudang : 0
- q) Kebun : 1
- r) Lain-lain : 22

- b. Internal
 - 1) Situasi Personel sebagaimana dalam Lampiran "A".
 - 2) Situasi Materiil (sarana dan prasarana) sebagaimana dalam Lampiran "B".

HASIL YANG DICAPAI

- 7. Pengungkapan Tindak Pidana
 - a. Tindak Pidana Kejahatan Konvensional sebagaimana Lampiran "C";
 - b. Tindak Pidana Kejahatan Transional sebagaimana Lampiran "D";
 - c. Tindak Pidana Kejahatan Kekayaan Negara sebagaimana Lampiran "E";
 - d. Tindak Pidana Kejadian / Kejahatan Berimplikasi kontijensi yang menjadi perhatian Sebagaimana Lampiran "F";

- 8. Rekapitulasi Laporan Polisi yang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Sebagaimana Lampiran "G".

ANALISA DAN EVALUASI

- 1) trend perkembangan Gangguan Kamtibmas berdasarkan data yang ada dan dilaporkan 2 (dua) bulan :
 - a) November 2019 : 262 kasus
 - b) Desember 2019 : 152 kasus

Dengan memperhatikan data tersebut diatas situasi Gangguan Kamtibmas mengalami *penurunan sebesar 110 kasus* dibandingkan bulan sebelumnya.

- 2) tingkat kemampuan penyelesaian perkara bila dibandingkan bulan sebelumnya mengalami *kenaikan sebesar 17 kasus atau 8%* dengan perincian sebagai berikut:
 - a) November 2019 : 208 kasus
 - b) Desember 2019 : 225 kasus

- 3) dalam hal clearance rate (CR) tidak mengalami Kenaikan yaitu :
 - a) November 2019 : 79 %
 - b) Desember 2019 : 148 %

PENUTUP

a. Kesimpulan

Penyelesaian perkara pada Bulan Desember 2019 mengalami *kenaikan* dengan prosentasi 8% dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada bulan November 2019. Pelaksanaan tugas Ditreskrimum Polda Kepri pada bulan Desember tahun 2019 berjalan dengan baik dan lancar.

b. Saran

- 1) di bidang Sumber Daya Manusia memerlukan penambahan personel yang berkualitas penyidik / pemeriksa (yang sudah mempunyai pendidikan kejuruan dasar reserse);
- 2) latihan dalam rangka peningkatan kemampuan profesionalisme baik yang dilaksanakan oleh masing-masing Satker maupun Ditreskrimum Polda Kepri masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya, baik pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;
- 3) dibidang Opsnal belum diperdayaan peran kring serse yang diintergrasikan dengan kring serse kewilayahan agar terhadap penanganan kasus-kasus menonjol dan yang menjadi atensi publik berhasil diungkap dalam waktu yang relatif singkat;
- 4) untuk pelibatan kekuatan personel dalam pengamanan antara Dit reskrimum, Ditreskrimsus dan Ditnarkoba agar jumlah yang dilibatkan sama banyak;
- 5) menindak tegas pelaku tindakan kejahatan terutama curas, curat, curanmor, street crime dan premanisme;
- 6) dalam setiap menangani perkara hendaknya selalu memperhatikan azas praduga tak bersalah serta mengedepankan motto melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat tanpa membedakan suku, ras atau golongan tertentu (tetap menjunjung hak asasi manusia);
- 7) guna mengurangi atau menghilangkan public complain dari masyarakat (pelapor/terlapor), maka prosedur pembuatan / pemberitahuan SP2HP dapat dipatuhi dan ditingkatkan pengirimannya oleh semua penyidik;
- 8) untuk menekan angka kriminalitas yang meresahkan masyarakat (street crime, curat dan preman) perlu diadakan operasi Kepolisian secara berkala dan berkelanjutan;
- 9) memberikan reward dan punishment kepada penyidikan yang belum mempunyai penyelesaian perkara.

Demikianlah laporan analisa dan evaluasi data Kriminal tindak pidana umum pada Ditreskrimum dan Satreskrim jajaran Polda Kepri dibuat, sebagai bahan pertimbangan Pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Batam, 13 Desember 2019

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA KEPRI

HERNOWO YULIANTO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72070694